

ABSTRAK

Praktik *greenwashing* semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya tuntutan transparansi pelaporan keberlanjutan. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *greenwashing*. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji peran moderasi tekanan pemangku kepentingan, yang diproksikan melalui tekanan aktivis lingkungan dan tekanan pemerintah, dalam hubungan antara tata kelola perusahaan dan *greenwashing*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder perusahaan publik nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender dan independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *greenwashing*, sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. Tekanan aktivis lingkungan tidak memoderasi hubungan tata kelola perusahaan terhadap *greenwashing*. Sebaliknya, tekanan pemerintah memperkuat pengaruh negatif keberagaman gender dan independensi dewan komisaris terhadap *greenwashing*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dalam menekan *greenwashing* lebih ditentukan oleh tekanan pemerintah sebagai mekanisme pengawasan eksternal.

Kata kunci: *greenwashing*, tata kelola perusahaan, tekanan pemangku kepentingan, tekanan pemerintah, tekanan aktivis lingkungan.

